

**UPAYA DAN TANTANGAN DIPLOMASI INDONESIA MERESPONS
KRISIS PENGUNGSI ROHINGNYA (2015-2019)**

(Skripsi)

Oleh

**HEZA OGA MAHENDRA
NPM 1816071003**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2024**

ABSTRAK

UPAYA DAN TANTANGAN DIPLOMASI INDONESIA MERESPONS KRISIS PENGUNGSI ROHINGNYA (2015-2019)

Oleh

HEZA OGA MAHENDRA

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak dari adanya krisis kemanusiaan di Rohingya, pemerintah Indonesia sepakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya. Selanjutnya, melalui diplomasinya Indonesia memberikan perhatian khusus untuk mengatasi krisis pengungsi melalui agenda-agenda besar kenegaraan. Namun Indonesia sendiri belum mampu secara maksimal menanggulangi fenomena ini, sehingga upaya Indonesia tentunya masih menemui tantangan dalam proses diplomasi untuk merespon krisis pengungsi Rohingya khususnya tahun (2015-2019).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan penelitian untuk menganalisis upaya dan tantangan diplomasi Indonesia merespons krisis pengungsi Rohingya. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi khususnya diplomasi kemanusiaan. Hasil dari penelitian yang penulis temukan adalah Pemerintah secara aktif melakukan upaya diplomasi melalui basis bilateral, regional, dan multilateral untuk mendukung kegiatan mencari penyelesaian krisis pengungsi. Tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan ini adalah dimana ASEAN memegang prinsip *noninterference* yang melarang intervensi atas urusan dalam negeri satu sama lain Indonesia juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atau bahkan sekedar meminta Myanmar memperlakukan etnis Rohingya dengan selayaknya.

Hasil dari upaya dan tantangan diplomasi Indonesia merespons krisis pengungsi Rohingya tahun 2015 adalah , Melakukan operasi *Search and Rescue* (SAR) bagi para pengungsi yang masih terapung di lautan, melaksanakan patroli laut, menyediakan bantuan kemanusiaan, bekerjasama dengan UNHCR, Malaysia dan Thailand. Disusul tahun 2017, Indonesia Dalam pelaksanaan diplomasi kemanusiaan Indonesia ini, Pemerintah Indonesia bersinergi dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar Untuk memperkuat peran ASEAN pula, Indonesia telah memberikan bantuan sebesar USD 500.000 yang diserahkan pada 20 Desember 2019.

Kata kunci: Diplomasi Kemanusiaan, Indonesia, Rohingya

ABSTRACT

INDONESIAN DIPLOMACY EFFORTS AND CHALLENGES IN RESPONDING TO THE ROHINGYA REFUGEE CRISIS (2015-2019)

By

HEZA OGA MAHENDRA

Indonesia is one of the countries affected by the humanitarian crisis in the Rohingya, the Indonesian government has agreed to provide humanitarian assistance to the Rohingya refugees. Furthermore, through its diplomacy Indonesia is paying special attention to overcoming the refugee crisis through major state agendas. However, Indonesia itself has not been able to optimally overcome this phenomenon, so Indonesia's efforts certainly still face challenges in the diplomatic process to respond to the Rohingya refugee crisis, especially in 2015-2019. This research uses qualitative methods with the research aim of analyzing the efforts and challenges of Indonesian diplomacy in responding to the Rohingya refugee crisis. This research uses diplomatic theory, especially humanitarian diplomacy. The results of the research that the author found are that the Government is actively carrying out diplomatic efforts on a bilateral, regional and multilateral basis to support activities to find a solution to the refugee crisis. The challenge that Indonesia must face in humanitarian diplomacy is that ASEAN adheres to the principle of non-interference which prohibits intervention in internal affairs. Indonesia also does not have the authority to force or even simply ask Myanmar to treat the Rohingya ethnic group properly. The results of Indonesia's diplomatic efforts and challenges in responding to the Rohingya refugee crisis in 2015 were, Carrying out Search and Rescue (SAR) operations for refugees still floating at sea, carrying out sea patrols, providing humanitarian assistance, collaborating with UNHCR, Malaysia and Thailand. Followed in 2017, Indonesia. In implementing Indonesia's humanitarian diplomacy, the Indonesian government synergized with various non-governmental organizations that joined the Indonesian Humanitarian Alliance for Myanmar. To strengthen ASEAN's role, Indonesia also provided assistance amounting to USD 500,000 which was handed over on December 20 2019.

Keywords: Non-Refoulement, Rohingya, Indonesia

**UPAYA DAN TANTANGAN DIPLOMASI INDONESIA MERESPONS
KRISIS PENGUNGSI ROHINGNYA (2015-2019)**

OLEH

HEZA OGA MAHENDRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **UPAYA DAN TANTANGAN DIPLOMASI
INDONESIA MERESPONS KRISIS
PENGUNGSI ROHINGNYA (2015-2019)**

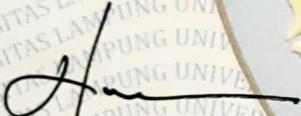
Nama Mahasiswa : **Heza Oga Mahendra**

No. Pokok Mahasiswa : **1816071003**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

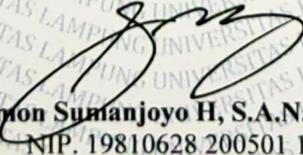
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP. 1979123 02014041 001


Khairunisa Simbolon, S.IP., M.A.
NIP. 1991092 62023212 049

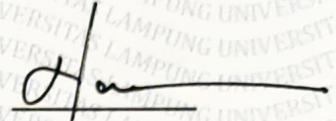
**Ketua Jurusan Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung**


Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 00

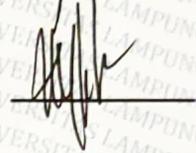
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

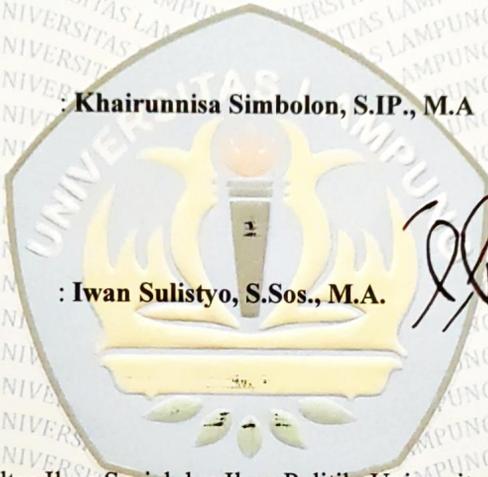
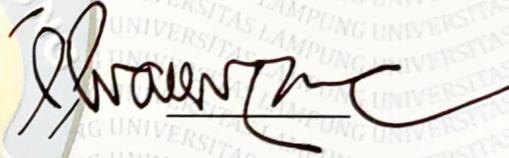
Ketua : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**



Sekretaris : **Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A**



Penguji : **Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **7 Maret 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 25 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



Heza Oga Mahendra
NPM. 1816071003

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Liwa Lampung Barat pada tanggal 2 Oktober 1999 dari pasangan Lekat Haidir dan Eka Indriyanti sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal pertama di SD Kegeringan Lampung Barat dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke tingkat menengah pertama di SMP IT Ar-raihan lalu lulus pada tahun 2015, penulis melanjutkan tingkat menengah atas di SMA Negeri 9 Bandarlampung lalu lulus pada tahun 2018, dan kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, Penulis juga menempuh Program Kerja Lapangan di Kementerian Luar Negeri Indonesia. Penulis merupakan Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Periode 2020/2021. Penulis merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional dimana penulis merencanakan mengeksekusi dan juga mengevaluasi seluruh program kerja divisi di HMJ Hubungan Internasional penulis juga aktif mengikuti kepanitiaan dan kegiatan kampus selama perkuliahan di Universitas Lampung.

MOTTO

“Hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana, permainan bagi mereka yang bodoh, komedi bagi mereka yang kaya, dan tragedi bagi mereka yang miskin”

- Sholom Aleichem.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayah, Bunda, dan Adik tercinta karena telah sabar, mendukung, serta terus mendoakan saya sepenuh hati dan penuh kasih sayang.

SANWACANA

Syukur kehadiran Allah SWT yang sudah memberi hidayah, rahmat, serta anugerah-Nya sehingga penulis tugas akhir berjudul “Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* di Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Pengungsi Rohingya” bisa penulis selesaikan sebagai prasyarat menyelesaikan Program Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini tidak akan selesai apabila tidak ada bimbingan, bantuan, dukungan, dan nasihat dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis sampaikan pada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional sekaligus seorang dosen yang senantiasa mendukung Penulis.
4. Roby Rakhmadi, S.Sos., selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang terus mendukung dan menuntun Penulis dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini dan selalu percaya dengan Penulis.
6. Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang terus mendukung Penulis dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini dan selalu percaya serta memahami Penulis.
7. Iwan Sulisty, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembahas yang senantiasa memberi masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

8. Dosen-dosen Jurusan Hubungan Internasional yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran berharga untuk Penulis baik dalam hal akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari.
9. Ayah, Bunda, dan Adik karena selalu mendoakan, mendukung dalam segala hal, memahami dan telah mempercayai Penulis dalam setiap prosesnya.
10. Kabinet Adarma PHMJHI Periode 2020/2021, terima kasih karena sudah menjadi teman berprogres untuk penulis hingga sekarang. Semoga bisa bekerja sama Kembali dilain kesempatan
11. Ailsa Arrafiani, Chita Ayu, Hemastia Kirana, Putri Tasya, Qonita Salma, Shaqila Vianta, Aqila Baity Jannaty Rehan Wahyu, Fabio Agus, Putranda Satria dan teman-teman liberal lainnya, terima kasih karena telah menjadi teman-teman yang sangat *supportive* dari awal perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan.
12. Awan Putih Organizer, terima kasih karena telah mengajarkan banyak hal terutama tentang ilmu hidup yang sangat bermakna
13. PT Enam Xavia yang suda menemani penulis dalam memahami kerasnya dunia kerja dan dunia politik Indonesia serta banyak memberikan pemahaman-pemahaman baru
14. SIX.ID yang sudah memberikan pengalaman luar biasa kepada penulis sehingga penulis memahami dunia kontruksi dan perdagangan umum
15. Mantaba Nusa Wisata yang sudah memberikan ruang untuk penulis dan teman-teman dari universitas lain untuk mengelola banyak pekerjaan
16. CV Adikarsa Jaya Abadi yang senantiasa memberikan kesempatan untuk mengelola banyak pekerjaan
17. CV Mekhanai Harapan Sudah Mempercai Penulis Sebagai pengelola perusahaan

Bandar Lampung, 25 Mei 2024

Heza Oga Mahendra

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Teori.....	17
2.2.1 Diplomasi.....	17
2.2.2 Diplomasi Kemanusiaan	20
2.3 Kerangka Pemikiran.....	22
III. METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Tipe Penelitian	25
3.2 Fokus Penelitian.....	26
3.3 Sumber Data.....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Teknik Analisis Data.....	27
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Kondisi Pengungsi Rohingya di Myanmar	27
4.2 Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Respon Krisis Pengungsi Rohingya	31
4.3 Tantangan Indonesia Dalam Respon Krisis Pengungsi Rohingya.....	52

V. KESIMPULAN	63
5.1 Kesimpulan	63
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Rakhine.....	3
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	23

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	16

DAFTAR SINGKATAN

AHA	: <i>Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)</i>
AKIM	: Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
HRWG	: <i>Indonesian Human Rights Watch Group</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IDPs	: <i>Internally Displaced Persons</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemlu	: Kementrian Luar Negeri
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
Menlu	: Menteri Luar Negeri
MOU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PNA	: <i>Preliminary Needs Assessment</i>
RI	: Republik Indonesia
RSO	: <i>Regional Support Office</i>
SAR	: <i>Search and Rescue</i>
SEAHUM	: <i>The South east Asian Humanitarian Committee</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Diplomasi adalah istilah yang diberikan pada saluran komunikasi resmi yang digunakan oleh anggota suatu sistem negara. Dalam mengatur dan memoderasi dialog antar negara, diplomasi berfungsi sebagai benteng melawan kekacauan internasional; dengan cara ini, sistem ini dapat dipahami sebagai mitra yang lebih rapuh, yang beroperasi dalam suatu sistem yang berbasis pada negara, terhadap tatanan domestik atau 'sistem politik' negara itu sendiri (Berridge, G.R, 2001).

Diplomasi dipandang sebagai 'sarana' atau 'instrumen' kebijakan luar negeri yang berharga. Memang sering dicatat bahwa layanan diplomatik yang memiliki sumber daya yang baik dan staf yang baik dapat memberikan peningkatan kekuatan dan pengaruh yang signifikan bagi suatu negara. diplomasi bukan sekadar melobi, menawar, dan menguping. Sebaliknya, diplomasi harus menyelesaikan tugas-tugas tersebut sedemikian rupa sehingga efek diplomasi yang moderat dan beradab terhadap perilaku umum suatu negara dapat dimaksimalkan (Berridge, G.R, 2001).

Diplomasi adalah proses yang berkelanjutan; Hal ini ditandai dengan keadaan yang kompleks dan tidak berwujud, namun pada dasarnya tidak stabil dan terus berubah. Oleh karena itu, seorang diplomat perlu memiliki kapasitas untuk mengapresiasi situasi yang sedang berkembang seperti untuk membedakan yang esensial dari yang fana hingga mengidentifikasi potensi ancaman terhadap kepentingan pemerintah yang diwakilinya. Kehati-hatian, pandangan ke depan, kecerdasan, penetrasi, kebijaksanaan (Berridge, G.R, 2001). Itu adalah kualitas yang sangat diperlukan, tanpa nilai-nilai itu maka diplomasi tidak dapat memenuhi fungsinya sebagai lembaga moderator utama dalam politik internasional.

Kemahiran seseorang diplomat dalam menganalisis suatu fenomena akan berdampak besar pada bagaimana kepentingan nasional suatu negara dapat dipertahankan.

Pada fenomena pengungsi yang bermula dari adanya kekerasan etnis yang terjadi di negara bagian Rakhine Myanmar, telah menyebabkan sebuah penderitaan besar didukung dengan tindakan diskriminasi yang tak berkesudahan. Kekerasan yang ekstrem menghantarkan masyarakat ditempat tersebut (Rohingya) memutuskan untuk pergi menyebrangi perbatasan negara menuju Cox's Bazar, Bangladesh dengan tujuan untuk mengungsi, bahkan sebanyak lebih dari 727.000 orang telah berusaha bermigrasi sejak tahun 25 agustus 2017. Cox's Bazar menjadi tempat dengan krisis pengungsi terpadat di dunia dengan dominasi pengungsi perempuan dan anak-anak (OCHA, 2018).

Terjadinya fenomena pengungsi saat ini di dunia internasional bukan lagi hal yang tidak biasa, mengingat krisis ini sudah menjadi masalah global. Bangladesh memang bukan hanya satu-satunya negara yang harus menanggung masalah akibat banyaknya pengungsi yang singgah, namun adanya persekusi yang masif di Myanmar kepada kelompok etnis Rohingya menjadi faktor utama derasnya gelombang pengungsi yang pergi ke berbagai negara. Salah satu negara tersebut adalah Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara turut menjadi sasaran para pengungsi yang datang ke Asia untuk mencari tempat untuk bermukim dengan aman. Sehingga diperlukan diplomat dan sarana diplomasi yang dibutuhkan suatu negara untuk melindungi kawasan negaranya dari ancaman negatif yang mungkin terjadi dari adanya peningkatan jumlah pengungsi.

Jumlah pengungsi yang datang ke negara Indonesia sedikit banyak telah membawa pengaruh yang kompleks bagi negara ini, mengingat latar belakang negara ini bukan negara pihak dari konvensi pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 dikarenakan alasan politik domestik, ekonomi dan keamanan, serta konteks Internasional. Hal ini tentunya menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk tidak diwajibkan menerima dan terbuka atas kedatangan pengungsi termasuk Rohingya, namun sikap yang di ambil oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini tetap menerima

datangnya para kelompok pengungsi dengan alasan kemanusiaan.

Peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik yang diderita etnis di suatu negara merupakan peran yang sangat mulia, serta memerlukan strategi agar tidak mengundang persoalan baru dengan negara di mana etnis itu berada, strategi itu bisa dirumuskan dari kebijakan-kebijakan yang diambil sebagai acuan kerja pemerintah Indonesia untuk membantu berbagai persoalan di dunia internasional. Indonesia memang memiliki peran aktif dalam meminimalisir konflik di kawasan Asia Tenggara khususnya yang terjadi di Myanmar dengan cara mendelegasikan menteri luar negeri untuk bertemu dengan Aung Sang Suu Kyi. Indonesia juga berhasil membuka akses bantuan kemanusiaan bagi kelompok etnis Rohingya.

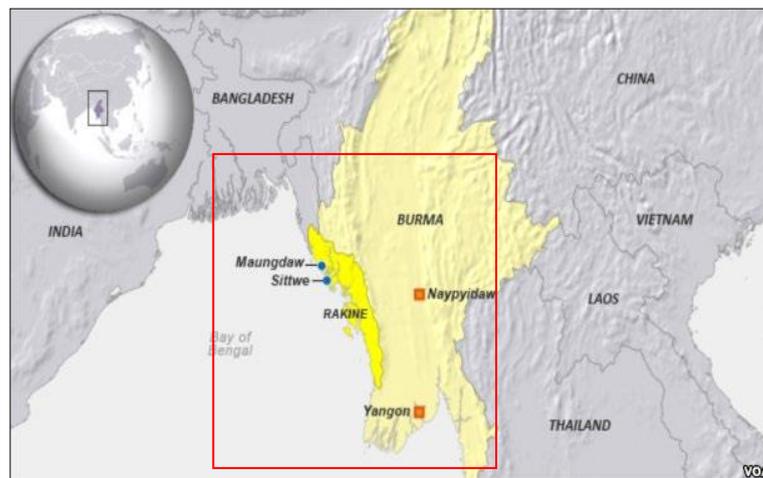
Pada Senin 04 September 2017, Menlu RI telah melakukan lawatan bersama pimpinan Myanmar Daw Aung San Suu Kyi di Naypyidaw guna membahas bagaimana peran Indonesia untuk meminimalisir kekerasan ekstrem yang ada di Myanmar khususnya etnik Rohingya. Kunjungan Menlu ini telah menjadi atensi dunia, karena menjadi bagian dari respons pertama di saat wakil pemimpin negara turun langsung membahas isu kemanusiaan yang terjadi di negara Myanmar (BBC, 2016).

Menlu RI juga bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal U Min Aung Hlaing dan tiga menteri yang saat ini sedang menjabat di jabatan strategis dipemerintahan Myanmar. Presiden Joko Widodo, Jumat 01 September 2017 juga mengatakan apabila Indonesia harus memberikan upaya nyata dalam membantu untuk menangani krisis kemanusiaan yang ada di negara Myanmar, selain memberikan bantuan obat-obatan dan makanan, membantu membangun sebuah rumah sakit di Myauk U, Rakhine yang akan selesai dibangun Oktober 2017 (DW,2017).

Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi berkomitmen untuk selalu membantu krisis kemanusiaan dengan didukung oleh kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan masyarakat internasional. Presiden Jokowi juga telah mendengarkan saran untuk menerapkan formula 4+1 bagi Myanmar yang disampaikan langsung oleh menteri luar negeri, Myanmar juga telah mengatakan

ketersediaannya untuk membuka akses bagi kelompok Aliansi kemanusiaan Indonesia Myanmar dalam menyalurkan bantuan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan (DW, 2017).

Keterlibatan Indonesia dimulai pada awal tahun 2015 ketika Muslim Rohingya di Myanmar banyak yang melarikan diri dari negaranya dengan kapal melalui Laut Andaman, dengan harapan dapat singgah dan mencapai negara lain yang ingin menerima mereka sebagai kelompok pengungsi, namun ratusan dari mereka telah dilaporkan meninggal di sepanjang jalan sebelum mencapai tempat tujuan. Etnis Rohingya dikenal sebagai kelompok minoritas Muslim di Rakhine State (sebelumnya dikenal sebagai Arakan), Rakhine State ini terletak di pantai barat Myanmar, ada pegunungan di sebelah timur yang dibagi antara negara bagian Rakhine dan Myanmar, sedangkan di perbatasan barat laut ada Bangladesh, dan perbatasan barat adalah Teluk Benggala (Lindblom, 2015). Berikut profil geografisnya :



Gambar 1. Peta Rakhine

Sumber : <http://www.voanews.com/a/myanmar-to-probe-allegations-of-abuse-against-rohingya>

Etnis Rohingya di Myanmar sebagai salah satu etnis minoritas yang paling teraniaya dan terdiskriminasi di dunia (*Economist News*, 2015). Isu pengungsi Rohingya mungkin menjadi isu yang terlupakan bagi beberapa negara, isu Rohingya ini bisa dikatakan kurang mendapat perhatian media, karena krisis migrasi serupa juga sering terjadi di negara-negara Eropa. Perbedaan antara kasus

Rohingya dan krisis migrasi di Eropa adalah tidak ada satu pun negara yang terlibat dalam kasus ini sebagai penandatanganan Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967 (Pagano, 2016).

Dalam konvensi pengungsi 1951, masyarakat internasional telah menaruh perhatian mereka untuk memastikan perlakuan yang memadai terhadap para pengungsi dan perlindungan hak asasi mereka dengan menyusun seperangkat pedoman dan undang-undang untuk anggota konvensi. Dibandingkan dengan organisasi Asia Tenggara yang biasa disebut *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), tidak ada konsensus formal di antara anggotanya dalam kasus pengungsi, organisasi ini lebih suka menggunakan badan hak asasi manusia parlementer ASEAN untuk mempromosikan advokasi yang berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia di kawasan itu.

Krisis Rohingya merupakan krisis terbesar kedua yang dihadapi kawasan Asia Tenggara sejak krisis imigran Indochina pada 1970-an. Kawasan Asia Tenggara kali ini tampaknya belum siap menghadapi krisis migran. Krisis pengungsi Rohingya yang muncul di negara-negara Asia Tenggara menunjukkan betapa lemahnya kawasan ini dengan institusi formal dan kesepakatan politik seperti Konvensi PBB 1951 dalam mempertahankan tindakan negara dalam menanggapi darurat pengungsi Rohingya membuat kasus ini jauh lebih akut dan tragis. Definisi pengungsi sendiri menurut Konvensi PBB 1951 adalah :

“Karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, atas dasar ras, agama, kebangsaan, atau keanggotaan suatu kelompok sosial, mendapati diri mereka berada di luar negara asal mereka dan tidak mampu atau tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu.” (The 1951 Convention on the Status of Refugee-Article 1a.)

Menurut definisi di atas, maka sekelompok etnis Rohingya yang bermigrasi ini dapat dikaitkan dengan definisi pengungsi di bawah Konvensi PBB 1951, karena penyebab yang sama yaitu penganiayaan dan diskriminasi oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Rohingya tidak punya pilihan selain menjadi pengungsi dan melarikan diri dari negara mereka dengan perahu. Tanggapan

pemerintah Myanmar terhadap isu Rohingya ini beranggapan bahwa mereka menolak akan eksistensi Rohingya sebagai etnis dan kewarganegaraan di Myanmar. Etnis Rohingya di Myanmar telah dianiaya selama beberapa dekade dan penganiayaan terjadi bahkan sebelum hari kemerdekaan republik Persatuan Myanmar (Roberts, 2015). Pemerintah Myanmar telah lama menyangkal Rohingya sebagai warga resmi mereka membuat Rohingya tidak memenuhi syarat untuk hak kewarganegaraan di bawah Militer Myanmar menyusun Undang-Undang Kewarganegaraan 1982. Minoritas Rohingya telah berjuang untuk menghadapi pengusiran setan dari penganiayaan dan diskriminasi yang dilakukan terhadap mereka oleh tirani pemerintah. Pemerintah Myanmar telah membatasi kebebasan bergerak etnis Rohingya dan tidak menawarkan mereka hak asasi manusia (termasuk kepemilikan tanah dan pernikahan) Orang-orang Rohingya siap mengambil risiko demi mendapatkan tempat yang aman bagi keluarga. Situasi terburuk di internal Myanmar khususnya diskriminasi dan penganiayaan terhadap Rohingya telah menyebabkan eksodus besar-besaran Rohingya melarikan diri dari rumah mereka (Ullah, 2011).

Menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) memperkirakan jumlah pergerakan pengungsi dan migran yang melintasi Teluk Benggala dan Laut Andaman meningkat secara signifikan pada paruh kedua 2014 dan pada paruh pertama 2015. (UNCHR, 2016) Meningkatnya jumlah pergerakan Rohingya dari Myanmar adalah terpengaruh ke Indonesia. Di awal tahun 2015, terjadi peningkatan jumlah pendaftaran UNHCR di Indonesia hampir 1.000 orang Rohingya dari Myanmar (UNCHR, 2016). Oleh karena itu, jumlah orang Rohingya yang melakukan perjalanan berbahaya ke pantai Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu karena kekerasan dan diskriminasi yang belum terselesaikan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.

Gelombang migrasi Rohingya sebagian besar di Malaysia, Thailand, dan Australia. Orang-orang yang putus asa merasa sangat siap mengambil risiko untuk mencari penghidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka, orang-orang menghadapi kondisi yang buruk dan diskriminasi yang keras di negara mereka sendiri memungkinkan mereka untuk memobilisasi dan melakukan perjalanan ke

negara lain baik legal maupun ilegal imigran (Heino, 2015). Perjalanan kelompok etnis Rohingya meninggalkan negara Myanmar juga ada yang terhenti di Thailand, dan menjadi titik transit utama dari para penyelundup. Bahkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengungsi yang melintasi lautan Asia Tenggara tiga kali lebih mematikan, dikarenakan sebagian besar daari mereka rentan untuk mengalami penganiayaan serta terjangkau penyakit di kapal (Heino, 2015).

Tumbuhnya kasus penyelundupan manusia membuat kasus ini semakin kompleks, para penyelundup telah memanfaatkan keputusan etnis Rohingya yang pergi daari negaranya dengan memfasilitasi dan mengambil keuntungan dari arus kelompok ini. Keterlibatan penyelundup menempatkan masalah-masalah lain bagi kawasan Asia Tenggara, yang akan mengancam stabilitas negara kawasan tersebut. Oleh karena itu, ratusan ribu orang melarikan diri dari Myanmar mencoba memasuki negara tetangga secara ilegal, orang-orang hidup dalam bahaya, banyak dari mereka mati di laut, dan alasan keterlibatan penyelundup dari kasus ini menjadi rumit.

Penghapusan kewarganegaraan etnis Rohingya oleh Pemerintah Myanmar telah menimbulkan diskriminasi bagi etnis-etnis tersebut. Akibatnya, Rohingya dikategorikan stateless sehingga Pemerintah Myanmar tidak bertanggung jawab atas keselamatan warga Rohingya. Dampak lain yang dirasakan oleh Rohingya adalah sulitnya mengakses hak-hak dasar dan layanan yang ada di masyarakat, Selain itu, etnis Rohingya yang memeluk Islam di antara masyarakat Myanmar yang mayoritas beragama Buddha menimbulkan gesekan yang berujung pada konflik. Padahal menurut S. Wolf bahwa akar konflik ini bukan hanya karena aspek agama tetapi juga karena aspek politik dan ekonomi. Menurutnya, dari aspek politik, ketakutan etnis Rohingya akan memisahkan diri jika mendapatkan hak dan kewarganegaraan seperti etnis lainnya. Selanjutnya dari aspek ekonomi, pemerintah merasa ada beban ekonomi yang harus ditanggung terkait keselamatan dan kesejahteraan jika Rohingya diakui sebagai warga negara (Singh, 2014).

Meningkatnya kekerasan terhadap Rohingya sebagai alasan utama mereka melakukan migrasi ini memang tidak bisa terlepas dari kejadian tahun 2012 yang ditandai dengan pernyataan Presiden Thein Shein tentang keadaan darurat di

Rakhine. Menanggapi hal tersebut, Surin Pitsuwan, Sekretaris Jenderal ASEAN, mengusulkan agar ASEAN, Pemerintah Myanmar, dan PBB mengadakan dialog agar kekerasan tidak meluas. Sayangnya, usulan ini ditolak oleh Myanmar. Saat itu Indonesia sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap Rohingya dengan menyediakan tempat bagi pengungsi Rohingya di Aceh karena tekanan dari kelompok Islam di. Namun, kelompok-kelompok ini masih beroperasi secara individual. Konflik di Rakhine terus terjadi hingga 2017 dalam skala yang lebih besar. Konflik ini menewaskan 1.000 orang dan 270.000 orang melarikan diri dari Rakhine (Ullah, 2016).

Myanmar tidak hanya menutup diri untuk berdialog tetapi juga dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok etnis Rohingya. Saat itu, ASEAN tidak bereaksi, karena terhambat oleh prinsip non-intervensi. Belum lagi, pemerintah Myanmar menolak kedatangan Tim Pencari Fakta PBB dan menuduh PBB membantu teroris, karena PBB terus mendesak Aung San Suu Kyi untuk mengungkapkan kebenaran dengan mengizinkan Tim Pencari Fakta untuk menyelidiki masalah tersebut di Rakhine. Memburuknya kondisi di Rakhine, mendorong masyarakat mendesak Pemerintah Indonesia untuk merespons krisis yang terjadi. Maka, pada 3 September 2017, Presiden Jokowi mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi terkait pembukaan ruang kemanusiaan. Berdasarkan fakta tersebut, tulisan ini berkontribusi untuk menjelaskan tindakan suatu negara dalam membuka ruang kemanusiaan melalui upaya diplomasi kemanusiaan.

Meningkatnya konflik internal negara Myanmar sendiri telah mengakibatkan semakin banyaknya *Internally Displaced Persons* (IDPs), IDPs sendiri didefinisikan sebagai orang atau kelompok orang yang dipaksa untuk melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka akibat konflik bersenjata, perang sipil, pelanggaran hak asasi manusia serta bencana alam yang melibatkan orang atau sekelompok orang tersebut namun belum melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional. Bisa dikatakan alasan perpindahan IDP sama seperti pengungsi internasional yaitu perang, konflik sipil dan perselisihan politik tetapi tetap di dalam negara mereka sendiri dan tidak melewati perbatasan internasional.

Kembali pada kasus etnis Rohingya yang juga dapat dikategorikan sebagai IDPs, maka kondisi IDPs Rohingya juga dianggap semakin memburuk seiring tidak adanya lembaga internasional dengan mandat formal yang diutus untuk membantu mereka dan tidak adanya sumber perlindungan, telah mengakibatkan IDPs ini hidup dalam situasi yang lebih menyedihkan daripada pengungsi. Menurut UNHCR Myanmar Factsheet, jumlah IDPs di Myanmar sekitar 1.526.000 jiwa termasuk etnis Rohingya di Rakhine State. Jumlah IDP yang lebih tinggi di suatu negara seringkali menjadi sumber masuknya pengungsi secara besar-besaran. Pada 2015, nelayan Indonesia telah menyelamatkan warga Bangladesh dan Rohingya dari Myanmar setelah mereka mendarat di Aceh dan Sumatera Utara. Memburuknya situasi di Myanmar berdampak pada banyaknya pergerakan pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia (UNHCR, 2016).

Indonesia sebagai negara transit favorit para pengungsi ini berada dalam situasi sulit untuk menghadapi arus masuk orang yang tidak terkendali ke negaranya di tengah persoalan domestik. Keluarnya pengungsi Rohingya di awal tahun 2015 telah membangkitkan respon dari negara tetangga khususnya Indonesia yang telah menyelamatkan lebih dari 1000 orang dari Myanmar setelah mereka mendarat di provinsi Aceh dan Sumatera Utara (UNHCR, 2016).

Posisi Indonesia sebagai posisi strategis dalam organisasi regional ASEAN diharapkan dapat lebih aktif dalam merespon krisis pengungsi Rohingya. Pasca eksodus pengungsi Rohingya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Malaysia dan Thailand menggelar pertemuan darurat di Putrajaya, Kuala Lumpur pada Rabu, 20 Mei 2015 dengan agenda utama pertemuan membahas krisis pergerakan pengungsi di kawasan. Hasil pertemuan ini, kebijakan Indonesia telah membuka bantuan kemanusiaan dan tempat penampungan sementara sampai para pengungsi dapat dikirim kembali ke rumah atau pemukiman kembali di negara ketiga dalam waktu satu tahun (Joint Statement, 2015).

Menyusul setelah Indonesia setuju untuk menyediakan tempat tinggal sementara, Menlu Republik Indonesia melalui pernyataannya menyatakan bahwa menyediakan tempat tinggal sementara bagi pencari suaka ini, namun Indonesia tetap akan aktif dalam mengatasi akar permasalahan dengan melakukan diplomasi

maraton. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa kasus pengungsi masuk dalam kategori *iregularmigrants issue* dan masalah ini bukan masalah satu atau dua negara tetapi ini adalah masalah regional (Setkab, 2015). Tempat penampungan sementara bagi para pengungsi dibatasi selama satu tahun, penyelesaian pengungsi akan dilakukan oleh masyarakat internasional dan sangat mengundang negara-negara lain di kawasan untuk bergabung dalam upaya ini. Indonesia aktif mendesak semua negara untuk mengambil tindakan dan memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya di Asia Tenggara. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan, Indonesia berharap semua negara termasuk organisasi internasional dapat bertindak bersama-sama. Oleh karena itu, respon Indonesia terhadap kasus Rohingya dengan menawarkan shelter bagi para pengungsi dapat dilihat sebagai respon jangka pendek dan selanjutnya Indonesia aktif mengajak negara lain untuk bekerjasama untuk mengatasi masalah ini (*Channel News Asia*, 2015).

Kasus pengungsi Rohingya berdampak langsung pada tiga negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand, setelah nasib Rohingya negara-negara anggota membuat Pertemuan Darurat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional Mengenai Pergerakan Orang Tidak Beraturan di Asia Tenggara. Dalam pertemuan ini sebagian besar negara ASEAN berpendapat bahwa mereka tidak dapat memikul beban sendirian dalam kasus ini. Hal yang sama juga disampaikan oleh pemerintah Indonesia, menurut Wakil Presiden RI yang menyatakan bahwa tantangan masalah pengungsi terlalu besar untuk ditangani oleh negara manapun sendiri dan kerjasama internasional sangat diperlukan (Kalla, 2016).

Menawarkan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi diharapkan sebagai respon segera atas krisis pengungsi saat ini dan perlu diikuti dengan upaya untuk menemukan solusi yang tahan lama dari krisis tersebut. Upaya diplomatik Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut tanpa melanggar prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara tetangga dan tidak menghangatkan hubungan antar negara ASEAN.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah penulis jelaskan, pemerintah Indonesia sepakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya. Selanjutnya, Indonesia memberikan perhatian khusus untuk mengatasi krisis pengungsi. Posisi Indonesia dalam menanggapi kasus pengungsi Rohingya sejalan dengan politik luar negerinya. Sebagaimana catatan di atas, pemerintah Indonesia sepakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya. Selanjutnya, melalui diplomasinya Indonesia memberikan perhatian khusus untuk mengatasi krisis pengungsi. Posisi Indonesia dalam menanggapi kasus pengungsi Rohingya sejalan dengan politik luar negerinya yang bebas aktif berarti Indonesia berhak memutuskan dan menentukan posisinya sendiri terhadap persoalan-persoalan dunia tanpa tekanan dari luar dan aktif berarti mereka berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya diplomatik yang membantu membangun dan memelihara perdamaian dunia. Dengan demikian, rumusan masalah penulis adalah sebagai berikut : **“Bagaimana Indonesia berdiplomasi merespons krisis pengungsi di Rohingya yang berdampak pada Indonesia? ”**

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya diplomasi Indonesia dalam menangani krisis pengungsi Rohingya (2015-2019)
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam diplomasi Indonesia dalam respon krisis pengungsi Rohingya (2015-2019)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaak Akademis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan berkontribusi dalam kajian keilmuan Hubungan Internasional, terutama bagi kajian ilmu bidang

diplomasi, krisis kemanusiaan dan pengungsi, untuk bahan informasi publik bagi pihak yang nantinya akan mengembangkan penelitian dengan topik yang masih saling berkaitan.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi wadah pembelajaran serta sumber rujukan ilmu pengetahuan, bukan hanya bagi mereka yang mendalami kajian Hubungan Internasional namun bagi masyarakat umum yang memiliki ketertarikan pada bidang ilmu sosial dan krisis kemanusiaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan tinjauan pustaka melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan pengungsi Rohingya dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Penelitian pertama yang penulis gunakan berjudul “*Indonesian Government Policy on Rohingya Refugees*” oleh Deasy Silvy Sari, Taufik Hidayat, Aliyuna Pratisti (2015). Penelitian ini menggunakan teori Migrasi internasional, dan Kebijakan Pemerintah Indonesia. Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani gelombang migrasi pengungsi Rohingnya di akhir tahun 2015. Penelitian ini juga membahas mengapa pemerintah Indonesia bersedia untuk menerima pengungsi Rohingnya.

Kemudian pada penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Kehadiran para pengungsi Rohingya di Perairan Aceh pada akhir tahun 201 tak terelakkan. *Humanity*, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan orientasi politik luar negeri Pemerintah Indonesia saat menerima pengungsi Rohingnya. Upaya untuk menolak keberadaan pengungsi Rohingnya di wilayah Indonesia telah dilakukan. Namun, empati terhadap Rohingnya telah menyentuh hati masyarakat Aceh untuk membantu Rohingnya. Pemerintah Indonesia akhirnya mengizinkan pengungsi Rohingnya sementara di wilayah Indonesia. Kebijakan ini dilandasi oleh rasa kemanusiaan sebagai bentuk orientasi dan komitmen Indonesia untuk membantu pengungsi Rohingnya. (Andalas Journal, 2015)

Penelitian kedua berjudul “*Role of Indonesian Humanitarian Diplomacy toward Rohingya Crisis in Myanmar*” Penelitian ini menggunakan teori *humanitarian* dan *diplomacy* oleh Setiawan. Penelitian ini membahas bagaimana Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap isu Rohingya pasca krisis dan kekerasan di State Rakhine, Myanmar pada tahun 2017. Ratusan ribu etnis Rohingya terpaksa menjadi pengungsi di perbatasan Bangladesh. Diplomasi kemanusiaan Indonesia dilakukan selama krisis ketika dunia menaruh perhatian tinggi pada penderitaan Rohingya.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana Indonesia memperjuangkan pengungsi Rohingya tanpa melakukan tindakan intervensi terhadap Myanmar. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Penelitian kualitatif dalam penelitian ini diartikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan secara holistik, dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alam yang khusus dan oleh memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Hasil dari penelitian ini Studi ini menemukan bahwa diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap penderitaan Rohingya di Myanmar dilakukan sebagai bagian dari implementasi kebijakan luar negeri untuk menjadi kebijakan proaktif dalam menjaga ketertiban dan perdamaian di dunia, termasuk kawasan Asia Tenggara. Selain itu, peran diplomasi kemanusiaan adalah untuk membantu Rohingya melarikan diri dari kekerasan dan membantu pengungsi. Temuan terakhir, diplomasi kemanusiaan juga sebagai jembatan untuk menawarkan solusi politik tanpa intervensi dalam urusan dalam negeri Myanmar meskipun pemerintah Naypyidaw tidak sepenuhnya menyambut usulan Indonesia (Setiawan, 2017).

Penelitian ketiga yang penulis gunakan berjudul “*A Conceptual Framework for Human Security*” (2017) yang ditulis oleh Sabina Alkire. Penelitian ini menggunakan teori *Human Security*. Penelitian ini membahas tentang tujuan dari keamanan manusia adalah untuk melindungi inti vital dari semua ancaman yang ada secara jangka panjang. Penelitian ini berfokus pada permasalahan “Inti vital” adalah istilah non-teknis untuk kekhawatiran yang ada di balik keamanan manusia.

Mungkin didefinisikan dalam ruang kemampuan, kebebasan orang harus melakukan apa dan menjadi apa. Elemen dari inti vitalnya adalah hak asasi manusia yang fundamental yang wajib dipatuhi oleh semua orang dan lembaga.

Metodologi yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa keamanan manusia paling baik ditentukan secara prosedural, sehingga sesuai dan layak. Namun definisi soal kelayakan dan kebebasan yang harus dijunjung tinggi masih menimbulkan hal yang tumpang tindih dan belum mampu direalisasi secara maksimal (Shabira, 2018).

Selanjutnya **penelitian keempat** berjudul “A Guide To Theory”: Epistemologi Politik Luar Negeri” (2007) oleh Wahyu Wicaksana, menurut penelitian ini, Makalah ini menjelaskan beberapa konsep dan teori yang menguraikan analisis kebijakan luar negeri dan juga menjelaskan beberapa tantangan untuk subjek kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan global transformasi. Sebagai kesimpulan ia mencoba untuk melakukan pendekatan global dan strategis untuk politik luar negeri kontemporer.

Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, dalam mempelajari politik luar negeri perlu memperhatikan implikasi-implikasi isu global seperti HAM, lingkungan, terorisme, ketimpangan, migrasi, energi, etnisitas, dan kosmopolitanisme terhadap perumusan keputusan politik luar negeri. Isu-isu global dideskripsikan sebagai sesuatu yang melintasi perbatasan strata level-level analisis yang selama ini memisahkan pengaruh dan implikasi tindakan individu, kelompok kecil, negara bangsa autonom, kelompok negara bangsa, dan sistemik. Isu-isu global tersebut berpengaruh terhadap dan muncul dalam semua level analisis sehingga pembatasan-pembatasan hierarkis. Kedua, pendekatan global perlu dicermati secara strategis. Memandang politik luar negeri yang erat bersinggungan dengan isu-isu global cenderung mendorong para analisis untuk terjebak pada perdebatan diskursus-diskursus global, sehingga pandangannya terbawa arus wacana dan tidak terjangkarkan. Oleh sebab itulah diperlukan sudut pandang yang menjadi titik acuan. Dalam hal ini setiap analisis politik luar negeri mendasarkan perspektifnya-perspektifnya pada kepentingan-kepentingan nasional yang

strategis. Sebagai contoh seorang analis politik luar negeri Indonesia mendasarkan perspektifnya pada arti penting suatu isu global bagi kepentingan nasional Indonesia yang berdampak luas dan menentukan bagi Bangsa Indonesia (Wahyu, 2007).

Penelitian kelima yang digunakan oleh penulis berjudul “*Indonesia’s Constitutional Immigration Policy: The Case Of Rohingya Ethnic Group Refugees*”. Oleh Dian Wahyu Utami (2018). Penelitian ini menggunakan teori pengungsi internasional. Pada penelitian ini konflik komunal antara kelompok etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar pada tahun 2012 menarik perhatian masyarakat internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Situasi sosial-politik memaksa etnis minoritas Rohingya meninggalkan Myanmar untuk pindah (bermigrasi) atau mencari suaka ke negara-negara tetangga, seperti Indonesia. Di Indonesia, pengungsi Rohingya sebagian besar bertahan di kamp “Manusia Perahu” di Aceh sejak tahun 2015. Masuknya pengungsi seperti Rohingya ke Indonesia merupakan masalah baru dalam hal konstitusional dan sosial. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan imigrasi konstitusional Indonesia dan tanggapan publik terhadap para pencari suaka yang diambil dari kasus kelompok etnis Rohingya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk menjelaskan masalah sosial dan penerapan peraturan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya di kamp “Manusia Perahu” di Aceh. Studi ini menemukan bahwa peraturan yang lebih eksplisit diperlukan untuk mengatur masuknya pengungsi, sehingga penduduk setempat tidak akan terganggu dan masih menciptakan keamanan antar negara (Utami, 2018).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.

No.	Indikator	Deasy Sylvia, dkk	Setiawan Asep	Shabira	Wahyu Wicaksono	Diaan Wahyu Utami
1	Judul Penelitian	<i>Indonesian Government Policy on Rohingya Refugees</i>	<i>Role of Indonesian Humanitarian Diplomacy toward Rohingya Crisis in Myanmar</i>	<i>A Conceptual Framework for Human Security” yang ditulis oleh Sabina Alkire</i>	<i>A Guide To Theory”: Epistemologi Politik Luar Negeri</i>	<i>Indonesia’s Constitutional Immigration Policy: The Case Of Rohingya Ethnic Group Refugees</i>
2	Teori/Konsep	<i>International migration</i>	Diplomacy dan humanitarian	<i>Human Security</i>	Kebijakan luar negeri	<i>International refugee</i>
3	Metodologi	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
4	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia menyusun rencana aksi dan menjalankan penanganan penguksi Rohingya dengan bantuan LSM lokal, nasional atau transnasional.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pertama, Indonesia melakukan diplomasi kemanusiaan untuk menghadapi kelompok etnis Rohingya di Myanmar dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Kedua, diplomasi kemanusiaan Indonesia berperan dalam meringankan beban kelompok etnis Rohingya sehingga tidak terjadi kekerasan berkelanjutan.	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa human security masih belum dapat di implementasikan di seluruh dunia karena banyaknya hambatan yang ada di masing-masing negara.	Hasil dari penelitian ini, adalah studi mengenai politik luar negeri menghubungkan sistem politik domestik suatu negara bangsa dengan sistem politik antar negara bangsa. Hal ini merevisikan tingkat analisis dari yang mikro dengan level makro. Akhirnya studi tentang politik luar negeri menjadikan Ilmu Hubungan Internasional berlandung interdisipliner bersama disiplin-disiplin ilmu sosial yang lain	Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa perlu ada lebih banyak regulasi eksplisit, seperti regulasi untuk Pemerintah yang mengizinkan mereka untuk menerima penguksi, mekanisme yang bisa dilakukan oleh Pemerintah mulai dari pertolongan pertama, serta kebutuhan akan aturan yang jelas mengenai kebutuhan mereka dan kewajiban.

Sumber: Hasil Rangkuman Peneliti (2021).

Sedangkan perbedaan posisi penelitian penulis dengan kelima penelitian sebelumnya adalah, melihat bagaimana upaya dan tantangan diplomasi Indonesia dalam respon krisis pengungsi Rohingya (2015-2019).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Diplomasi

Diplomasi bukanlah hal baru dalam dunia internasional, diplomasi telah ada sejak awal umat manusia, dan diplomasi hadir dalam menawarkan cara alternatif untuk melakukan negosiasi antara dua orang atau dua negara yang penting untuk menjaga hubungan internasional. Diplomasi mengacu pada proses pemerintah membangun komunikasi dengan negara asing dalam upaya untuk membangun pemahaman yang sama dan untuk mempromosikan gagasan negara, institusi, budaya, dan tujuan nasional. Banyak fungsi diplomasi seperti mencegah perang dan kekerasan yang biasanya ditangani pada tingkat pembicaraan dan dapat meningkat menjadi perjanjian maupun embargo. Diplomat Inggris Harold Nicolson mendefinisikan diplomasi sebagai :

“manajemen hubungan internasional melalui negosiasi; metode dimana hubungan ini disesuaikan dan dikelola oleh duta besar dan utusan bisnis atau seni para diplomat”.

Oleh karena itu, diplomasi memberikan jalan bagi setiap perubahan yang damai dan efisien karena urusan dunia tanpa diplomasi akan dihapuskan (Amacker C, 2011). Konsep diplomasi terdiri dari prosedur dan teknik untuk melakukan hubungan antar negara. Diplomasi menjadi sebagai mesin resmi untuk melakukan hubungan baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Kegiatan diplomasi dapat mencakup semua jenis masalah dari masalah yang paling sederhana sampai masalah yang sangat penting dan diplomasi selalu dijalankan baik dalam masa damai maupun perang. Melalui sejarah diplomasi telah menjadi elemen terpenting dalam menjaga perdamaian dan penciptaan perubahan positif.

Diplomasi telah hadir untuk menyelesaikan agenda tertentu secara harmonis dan damai. Ada dua tujuan utama diplomasi yaitu tujuan politik dan tujuan non politik. Tujuan politik terkait bagaimana pemerintah menggunakan diplomasi untuk mengamankan tujuan kepentingan negara sebagaimana didefinisikan oleh kebijakan luar negeri dan diplomasi digunakan untuk meningkatkan pengaruh satu negara atas negara lain. Tujuan non politik diplomasi berarti cara negara dalam menggunakan diplomasi pada kegiatan non politik seperti perdagangan ekonomi dan industri. Sedangkan secara keseluruhan tujuan diplomasi adalah untuk membujuk dan mempromosikan kepentingan suatu bangsa dengan cara persahabatan dan kerja sama (Amacker C, 2011).

Menurut KM Panikkar dalam bukunya yang berjudul *The Principle of Diplomacy*, maka diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional merupakan seni dalam mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain (SL. Roy. 2001. Hlm 21), yang dalam hal ini merupakan kepentingan nasional suatu negara dalam dunia internasional, namun oleh sebagian pandangan diplomasi lebih menekankan terhadap negosiasi– negosiasi perjanjian atau sebagai posisi tawar-menawar dengan negara lain. Diplomasi sangat erat dengan penyelesaian permasalahan– permasalahan yang dilakukan dengan cara–cara damai, tetapi apabila cara–cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan– tujuannya (RW, Sterling: 233).

Sehingga dapat dikatakan bahwa perang juga merupakan salah satu sarana dalam diplomasi di dunia internasional. S.L. Roy, mengkaji hal-hal penting yang terdapat dalam berbagai definisi mengenai diplomasi. Menurutnya dari definisidefinisi tersebut beberapa hal tampak jelas, bahwa: 1. Unsur pokok diplomasi adalah negoisasi, 2. Negoisasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara, 3. Tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga serta memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin dan dilaksanakan secara damai, pemeliharaan perdamaian dengan

tanpa merusak kepentingan nasional merupakan tujuan utama diplomasi, 4. Teknik-teknik diplomasi yang sering dipakai untuk mempersiapkan perang bukan untuk menghasilkan perdamaian.5. Diplomasi berhubungan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara, 6. Diplomasi modern berhubungan erat dengan sistem negara, 7. Diplomasi tidak bisa dipisahkan dari perwakilan negara (SL. Roy. 1995. Hlm 4).

Tujuan diplomasi bagi setiap negara adalah pengamanan kepentingan nasional, kebebasan politik dan integritas territorial. Menurut Kautilya tujuan utama diplomasi adalah menjamin keuntungan maksimum Negara sendiri, dan kepentingan terdepan tampaknya adalah pemeliharaan keamanan. Fungsi utama dari pelaksanaan diplomasi adalah negosiasi dan ruang lingkup diplomasi adalah menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan-kepentingan Negara melalui negosiasi yang sukses, apabila negosiasi gagal perang merupakan bagian dari sarana diplomasi. Selain itu terdapat tiga cara dasar dalam pelaksanaan diplomasi suatu negara yaitu kerjasama, persuaian dan pertentangan. Sehingga dalam proses diplomasi suatu Negara pasti akan menjalankan tiga pelaksanaan diplomasi tersebut.

Fungsi utama dari pelaksanaan diplomasi adalah negosiasi dan ruang lingkup diplomasi adalah menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan-kepentingan negara melalui negosiasi yang sukses, apabila negosiasi gagal perang merupakan bagian dari sarana diplomasi. Selain itu terdapat tiga cara dasar dalam pelaksanaan diplomasi suatu negara yaitu kerjasama, persuaian dan pertentangan (SL. Roy. 1995. Hlm 4).

Diplomasi juga terbagi dua, yaitu: 1. *Soft Diplomacy*: diplomasi dalam bentuk penyelesaian secara damai dalam bidang kebudayaan, bahasa, persahabatan dan ekonomi 2. *Hard Diplomacy*: diplomasi dalam bentuk perang, yaitu agresi militer dan politik (Andri Hadi. 2009). Cara *soft diplomacy* dengan mengikuti perundingan bilateral dengan negara lain serta menyerahkan penyelesaian permasalahan konflik kepada pihak ketiga yaitu Mahkamah Internasional. Selain itu, adapun untuk *hard diplomacy* dengan cara meningkatkan kekuatan militer negara tersebut dan melakukan kerja

sama pertahanan dengan negara lain untuk meningkatkan efek penangkalan (*deterrence*) ketika terjadi konflik. Konsep diplomasi akan membantu penulis dalam menganalisis Praktik diplomasi pemerintah Indonesia untuk mempromosikan kebijakan luar negerinya dalam menanggapi peristiwa internasional terutama dalam isu arus pengungsi.

2.2.2 Diplomasi Kemanusiaan

Suatu negara dapat merespon negara lain yang sedang dilanda bencana ataupun konflik dengan berbagai cara seperti memberikan bantuan. Upaya pemberian bantuan ini disebut dengan diplomasi kemanusiaan, terdapat pengertian-pengertian tentang diplomasi kemanusiaan. Lamb mendefinisikan upaya diplomasi kemanusiaan adalah soal memaksimalkan bantuan untuk operasional dan program untuk membangun kerjasama apabila diperlukan dengan tujuan kemanusiaan (C, Lamb. 2008).

Menurut Reigner, upaya diplomasi kemanusiaan digunakan tidak hanya oleh organisasi kemanusiaan tetapi juga oleh badan kerjasama nasional dan kementerian seperti urusan luar negeri, pertahanan, pembangunan, perlindungan sipil yang terdiri dari departemen bantuan kemanusiaan untuk menanggapi masalah domestik atau internasional darurat (A.F. Cooper, J.Hennie, R Thakur, 2013).

Definisi tentang diplomasi kemanusiaan yang ditafsirkan oleh Palang Merah Internasional adalah sebuah upaya untuk memengaruhi pihak yang bersangkutan dalam konflik bersenjata, seperti negara dan aktor non negara juga seluruh masyarakat. Tujuan dari diplomasi kemanusiaan adalah sebuah negosiasi yang bersifat kemanusiaan dengan kelompok bersenjata yang berada ditengah konflik. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan diplomasi kemanusiaan adalah sebuah negosiasi yang dilakukan pihak yang terlibat langsung untuk mengelola, mengkoordinasikan dan memberikan bantuan dan perlindungan kemanusiaan untuk tujuan (C, Lamb. 2008):

1. Memastikan penyediaan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada populasi yang rentan;

2. Melestarikan ruang kemanusiaan; dan
3. Mempromosikan penghormatan yang lebih baik terhadap hukum internasional. Unsur-unsur diplomasi kemanusiaan yang muncul dari pengertian yang dikemukakan oleh Palang Merah Internasional disepakati adalah kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas, kemandirian, pelayanan sukarela, persatuan, dan universalitas.

Aspek-aspek diplomasi kemanusiaan menurut Palang Merah Internasional meliputi kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas, kemandirian, pelayanan sukarela, persatuan, dan universalitas. Berdasarkan aspek-aspek ini maka diplomasi kemanusiaan merupakan bagian dari upaya-upaya untuk membangun hubungan yang baik guna mencapai kesepakatan yang terbaik pula bagi masyarakat lokal, pihak yang beronflik, pemangku kepentingan untuk meminimalisir korban dan krisis kemanusiaan dari adanya konflik bersenjata (D. Hilhorst, 2013).

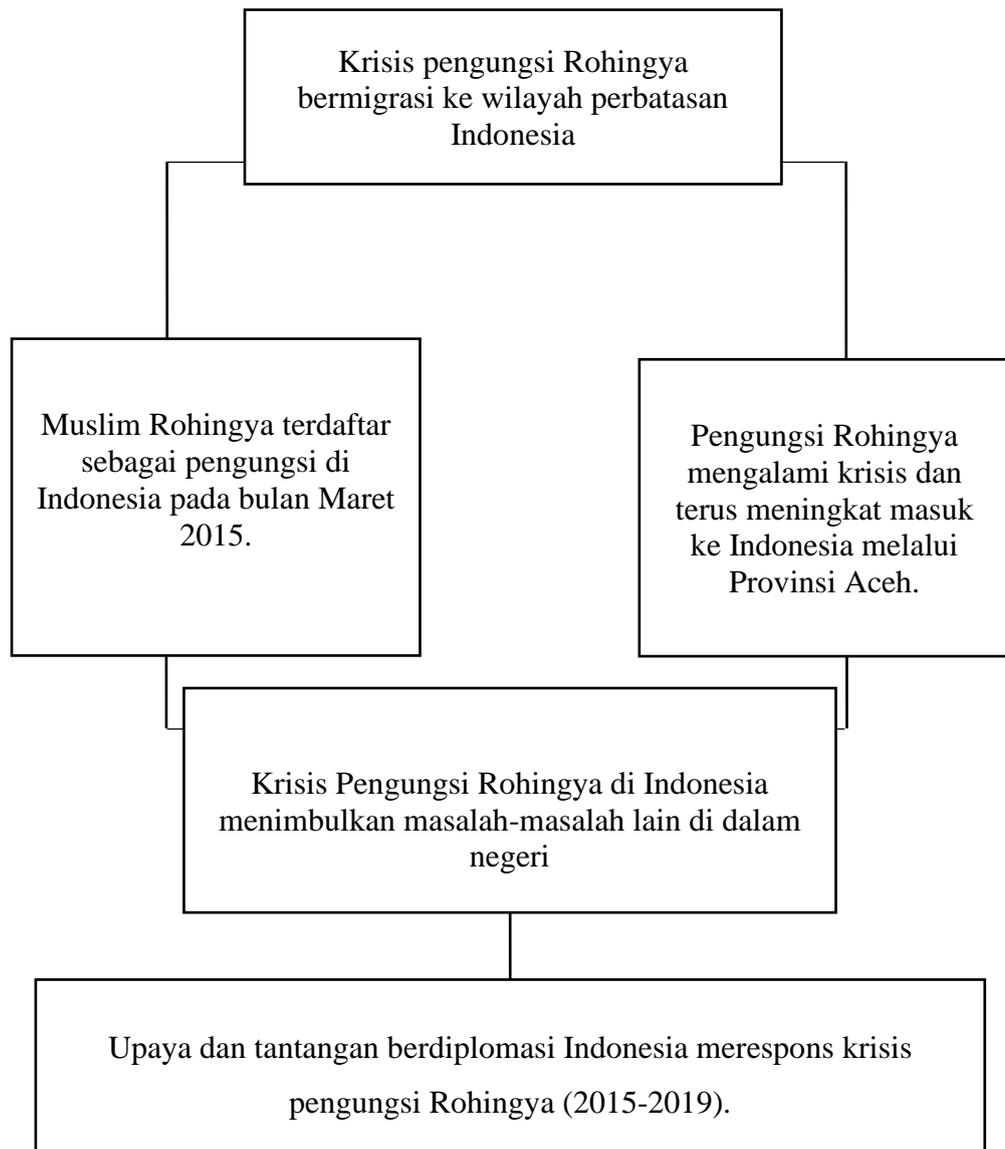
Krisis kemanusiaan memang bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah krisis kemanusiaan yang disebabkan karena faktor alamiah seperti bencana alam, namun adapula yang disebabkan oleh tindakan-tindakan manusia itu sendiri seperti konflik dalam perang. Konflik ini mungkin terjadi karena adanya kegiatan perebutan kekuasaan ataupun sumber daya alam.

Dalam sejumlah kasus konflik di berbagai negara, konflik etnis menjadi salah satu alasan yang sering muncul. Konflik etnis ini dapat menimbulkan korban jiwa yang besar dikalangan warga karena warga sipil yang tidak berdaya seringkali menjadi korban. Etnis minoritas Rohingya di Myanmar termasuk di antara mereka yang mengalami konflik etnis yang menyebabkan banyak korban dan pengungsian. Bencana dan konflik serta respon yang memicunya adalah sebuah fenomena sosial yang menarik untuk diteliti. Sehingga nantinya teori ini akan digunakan untuk membantu menganalisis bagaimana diplomasi yang dilakukan secara khusus merujuk pada diplomasi kemanusiaan yang memiliki relasi kuat dengan latar belakang penelitian.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah struktur yang di gambarkan pada sebuah bagan guna membantu penulis dalam menjelaskan alur berpikir dalam meneliti tentang bagaimana upaya dan tantangan upaya dan tantangan diplomasi Indonesia dalam respon krisis pengungsi Rohingya (2015-2019).

Diplomasi Indonesia dalam upaya perlindungan pengungsi Rohingya yang datang akibat dampak dari konflik internal negara Myanmar, serta menganalisa secara mendalam tentang tantangan untuk merespon krisis Rohingya terutama pemenuhan hak-hak pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Oleh Penulis

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas khususnya tentang perdagangan manusia dan aktor non-negara. Menurut Bogdan dan Taylor yang di kutip oleh Lexy J. Moleong mengemukakan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode penyajian data dalam penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Maka penelitian ini menampilkan data-data yang menggambarkan suatu masalah, gejala, fakta dan peristiwa yang akan dijelaskan secara deskriptif. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan uraian secara mendalam tentang kebijakan luar negeri Indonesia sebagai negara non ratifikasi konvensi pengungsi 1951, namun tetap berupaya untuk membantu pengungsi Rohingya dalam menekan berbagai ancaman *human security*, sebagai objek yang akan diteliti. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan pula untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana upaya dan tantangan diplomasi pemerintah Indonesia untuk membantu pengungsi Rohingya yang secara masif berpindah ke negara Indonesiaa untuk mencari suaka.

3.2 Fokus Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan yang diteliti dan untuk menjaga agar tidak biasanya masalah yang menjadi fokus penelitian, maka peneliti membatasi masalah dengan menitik beratkan pada upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam merepson krisis pengungsi Rohingya yang hadir di Indonesia.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka atau dari literatur online, seperti buku, jurnal, situs resmi, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu laporan berupa data, berita dan statistik resmi dari Indonesia dan pemerintah Myanmar pada artikel dalam *website* resmi organisasi dan instansi yang bersangkutan, seperti myanmar.int, state.gov, ilo.org, unodc.un.org, kemenlu.go.id hingga sumber artikel dari berita yang berbasis online lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data studi literatur. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data dan informasi dari sejumlah sumber yang kredibel seperti buku, dokumen, jurnal, artikel berita atau koran, catatan sumber yang kredibel, dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Studi pustaka yang saya lakukan menggunakan beberapa referensi buku dan jurnal seperti buku *Intrdoucing Analyzing Foreign Policy* tahun 2022 oleh Derek Beach, juga data-data mengenai jumlah pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia melalui website www.iom.int/news/largest-rohingya-group-arrive-indonesia sebagai lembaga internasional yang secara berkelanjutan dan kolektif mempublikasi soal migrasi internasional, diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia.

3.5 Teknik Analisis Data

Proses analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu berdasarkan pada data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi asumsi.

Peneliti melihat fakta empiris dan mempelajari fenomena yang terjadi. Proses analisa data ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu :

1. Reduksi data upaya-upaya yang telah dilakukan di Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya yang menjadi data penelitian, di reduksi dengan cara melihat upaya diplomasi yang dilakukan pada rentan tahun 2015-2019 yang dikhususkan untuk respon penanganan krisis pengungsi Rohingya di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi.
2. Penyajian data. Berbagai data yang telah direduksi, dipaparkan terutama yang berkaitan dengan teori kebijakan luar negeri dan diplomasi yang menjadi landasan Indonesia dalam mengambil sikap untuk upaya diplomasi yang dilakukan sebagai respon penanganan krisis pengungsi Rohingya di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi.
3. Pengambilan kesimpulan. Serangkaian proses analisis data dan hasil data yang telah terkumpul.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa upaya diplomasi Indonesia telah dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya kepentingan dalam merespon krisis pengungsi Rohingya. Pemerintah Indonesia menunjukkan kepentingan negaranya untuk mendorong negara lain yang merupakan negara asal, transit, dan tujuan untuk bertanggung jawab menemukan pemukiman pengungsi Rohingya. Pemerintah secara aktif melakukan upaya diplomasi melalui basis bilateral, regional, dan multilateral untuk mendukung kegiatan mencari penyelesaian krisis pengungsi. Indonesia juga aktif membangun hubungan bilateral dengan Myanmar sebagai negara asal pengungsi untuk membahas krisis tersebut.

Myanmar sebagai negara asal para pengungsi memiliki peran penting dalam menanggapi krisis untuk membujuk dan mendorong negara Myanmar menjadi prioritas pemerintah Indonesia agar negara Myanmar mau bertanggung jawab. Kekhawatiran pemerintah Indonesia tentang perlunya mengatasi akar penyebab krisis pengungsi adalah jika krisis tidak terselesaikan dari akarnya, orang akan terus mempertaruhkan nyawanya pada penyelundupan ilegal dan menciptakan perjalanan migrasi ilegal berbahaya serta pergerakan pengungsi besar-besaran lainnya yang semakin tidak dapat dihindari. Kegiatan diplomasi Indonesia secara konsisten mendorong Myanmar untuk bekerja sama mencari penyelesaian krisis pengungsi Rohingya. Komunikasi intensif juga telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya menghentikan krisis pengungsi, seperti pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Myanmar U. Wunna Maung Lwin (Mei 2015) dan pertemuan dengan Penasihat Negara Myanmar Draw Aung San Suu Kyi

(Desember 2016). Setelah berbagai tindakan diplomasi, pemerintah Myanmar setuju mengambil perannya untuk mengatasi krisis migran di Asia Tenggara. Oleh karena itu, upaya diplomasi bilateral Indonesia dengan Myanmar menekankan pentingnya penyelesaian krisis dari akarnya dan peran negara asal untuk mengatasi krisis tersebut. Dalam *platform* kawasan, yakni ASEAN, diplomasi Indonesia berperan aktif untuk mendorong kawasan mengambil tanggung jawab dalam penyelesaian pengungsi Rohingya. Indonesia telah mengusulkan beberapa rekomendasi yaitu membangun mekanisme regional ASEAN dalam menanggapi krisis pengungsi dan menyarankan ASEAN untuk membangun tanggung jawab bersama di antara anggota ASEAN dalam menangani masalah pengungsi.

Dalam forum multilateral, Indonesia secara aktif mengangkat isu krisis pengungsi dan meningkatkan kerjasama setiap negara terkait untuk mengambil tanggung jawab atas krisis tersebut. Melalui diplomasi maratonnya, Indonesia menginisiasi beberapa pertemuan multilateral untuk mengatasi krisis pengungsi saat ini, seperti *Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of Irregular Movement of Persons* (November 2015) dan hosting *Bali Process* (Maret 2016). Pertemuan Meja Bundar Jakarta merupakan bentuk aktif pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan yang berkembang dari pergerakan tidak teratur seperti arus pengungsi. Pertemuan tersebut menyerukan tanggapan yang terkoordinasi antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan serta untuk memperkuat kerja sama multilateral guna menemukan penyelesaian krisis.

Forum kedua adalah *Bali Process*, tujuan dari *Bali Process* adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang pengelolaan perbatasan, penegakan hukum, perlindungan korban, mengatasi akar permasalahan dan menyediakan situasi pengungsi dengan pemukiman permanen. Dalam forum ini, Indonesia telah meminta anggota *Bali Process* untuk mempertimbangkan melakukan lebih banyak dan memperkuat kerjasama dalam menanggapi kasus migrasi ilegal. Selain itu, dalam *High-Level United Nations Talks on Migration and Refugee*, wakil Indonesia Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengajak semua negara untuk bekerja sama dalam menangani kasus migrasi dan pengungsi. Diplomasi Indonesia

melalui forum-forum multilateral ingin terus mendorong negara yang bersangkutan untuk mencari solusi komprehensif atas krisis pengungsi, dan dengan mengadakan beberapa pertemuan merupakan bukti bahwa diplomasi Indonesia aktif di kawasan untuk mencari solusi krisis pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. F. Cooper, J. Heine, R. Thakur, and R. C. Thakur, 2013, *The Oxford handbook*
- Ahsan Ullah, A. K. M, 2016, “*Rohingya crisis in Myanmar: Seeking justice for the stateless*”. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Halaman: 285-301.
- Alina Lindblom, E. M., 2015, “*Persecution of the Rohingya Muslim*”. http://www.fortifyrights.org/downloads/Yalei_Persecution_of_the_Rohingya_October_2015.pdf (Diakses Pada 24 Mei 2022)
- Amacker, C.,2011, *The Functions of Diplomacy*. Retrieved November 5, 2016, from E-International Relations Students : <http://www.ei-ir.info/2011/07/20/the-functions-of-diplomacy/>(Diakses Pada 24 Mei 2022) *and Red Crescent Societies Info*.
- C. Lamb,2008, “*Humanitarian Diplomacy*”, *International Federation of Red Cross Crisis Response*. Routledge.
- D. Hilhorst, 2013, *Disasteir, Conflict And Society In Crises: Everyday Politics Of*
- G. R.Berridge, 2001, *Diplomatic Theory from Machiavelli to Kissinger*, New York : Palgrave.
- Heiino, E. O, 2015, “*Myanmar’s refugee situation reacquires long-term solutions*”, *Ministry for Foreign Affairs of Finland*: <http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=327609&contentlan=2&culture=en-US> (Diakses Pada 24 Mei 2022)
- Kementrian Luar Negeri, 2015, “*Masyarakat ASEAN*”, Jakarta, MEDIA PUBLIKASI DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN.
- Kementrian Luar Negeri, 2017, “*Hubungan Bilateral Myanmar dan Indonesia*”, Jakarta, <https://kemlu.go.id/yanon>. (Diakses Pada 23 November 2023)
- Indonesia Factsheet*, 2016, *from United Nations Commissioner for Refugees*.(Diakses Pada 24 Mei 2022)

- Indonesia Factsheet*, 2016, from United Nations Commissioneir for Refugees (UNCHR): <http://www.unhcr.org/50001bda9.pdf> (Diakseis Pada 24 Mei 2022)
- Indonesia urges nations to help solve refugee problem in Southeast Asia*, 2015, Channel News Asia : www.channelnewsasia.com//asiapacific/indonesia-urges-nations/1862844.html, (Diakses Pada 24 Mei 2022)
- Joint statement: Ministerial meeting on irregular movement of people in Southeast Asia*, 2015, <http://reliefweb.int/report/myanmar/joint-statement-ministerial-meeting-irreigular-movement-people-southeast-asia> (Diakses Pada 24 Mei 2022)
- Myanmar Factsheet*, 2016, from United Nations High Commissioneir for Refugees (UINCHR): <http://www.unhcr.org/50001cf99.html> (Diakses Pada 24 Mei 2022)
- News, 2015, “*The most persecuted people on Earth, The Economist: http://www.economist.com/news/asia/21654124-myanmars-muislim-minority-have-been-attacked-impunity-stripped-vote-and-driven*, (Diakses Pada 24 Mei 2022) *of a commuinity of practice and prospects for international recognition*”, *International Red Cross*, Vol. 93, No. 884, Page: 1211–1237. *of modern diplomacy*. Oxford Uiniveirsity Press.
- P. Régnieir, 2011, “*The emerging concept of humanitarian diplomacy: identification*”
- Pagano, A, 2016, “*The Rohingyas Refugee Crisis: A Regional and International Issue*”, Middle East Institute, <http://www.mei.edu/content/map/Rohingyas-reifugee-crisis-regional-and-international-issue> (Diakseis Pada 24 Meii 2022)
- Report, 2018, UNOCHA, <https://www.unocha.org/publication/ocha-annual-report/ocha-annual-report-2018>. (Diakses Pada 6 Desember 2022)
- Roberts, K, 2015, “*Rohingya Refugees From Myanmar Have Been Persecuted for Decades*” <http://www.nytimes.com/2015/05/13/world/asia/myanmar-rohingya-refugees-rakhine-burma.html>.(Diakses Pada 24 Mei 2022)
- Singh, B, 2014, “*Tantangan orang Rohingya Myanmar: menghadapi satu minoritas teraniaya dan implikasi untuk keamanan nasional dan regional*”, Gadjah Mada University Press.
- Statement by H.E. Mr. Jusuf Kalla Vice-President of The Republic of Indonesia at At The High- Level Plenary Meeting to Address Large Movements of Reifugees and Migrants*, 2016, Vice President of Republic of Indonesia: <http://www.wapresri.go.id/en/statement-by-h-e-mr-jusuf-kalla-vice-president-of-the-republic-of-indonesia-at-at-the-high-level-plenary>

meeting-to-address-large-movements-of-refugees-and-migrants/, (Diakses Pada 24 Mei 2022)

Ullah, A. A. 2011. "Rohingya Refugees to Bangladesh: Historical Exclusions and Contemporary Marginalization". *Journal of Immigrant and Refugee Studies*, Halaman: 139-161.